



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PERNYATAAN VISI

Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom telah mendapatkan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi :

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

- a. **Mandiri** berarti suatu kondisi daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung kepada daerah lain. Oleh karena itu, semua aktivitas daerah perlu didasarkan atas kemampuan dan inisiatif masyarakat, baik perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil, dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, yang tercermin dalam aspek kehidupan (nilai sosial budaya, ekonomi, taat azas, kelembagaan, keuangan daerah) sehingga sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, konsep kemandirian yang dimaksud bukan merupakan sebuah kondisi suatu daerah yang tidak menjalin hubungan dengan daerah lain, namun sebuah konsep dinamis yang tetap mengenal saling



ketergantungan. Kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah adalah daya saing yang meningkat selama lima tahun ke depan.

- b. **Berdaya saing** berarti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam berkompetisi dari berbagai aspek, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi.
- c. **Sejahtera** merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. Dalam konteks ini, sektor pertanian sebagai basis perekonomian telah menyatu dan memiliki peran paling penting di seluruh bidang tersebut sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
- d. **Berakhlak mulia** mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banjarnegara, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara selalu mengedepankan norma-norma agama.

2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1) **Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing**

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan memfokuskan sektor pertanian dan pariwisata sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan



kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian dan pariwisata didorong menjadi penggerak kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian dan pariwisata akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sedangkan untuk sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian (agrowisata).

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti industri, perdagangan, dan pertambangan yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya.

Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata pertambangan, perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi perdesaan, meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen serta mengembangkan keanekaragaman produk pangan.

Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan produksi pangan baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan meningkatkan perekonomian kerakyatan yang terdiri dari pariwisata, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

2) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara



transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan sehingga terjadinya penurunan jumlah kasus baik di lingkungan internal pemerintah maupun di masyarakat serta meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercapai kehidupan yang tenteram dan aman di masyarakat.

Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, melaksanakan pengawasan secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

3) **Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius**

Kehidupan aman, damai, demokratis dan religius adalah dambaan seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan kualitas kehidupan yang aman, damai dan religius merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dalam mewujudkan kondisi aman dan damai dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum dengan tidak lupa melibatkan seluruh tokoh masyarakat sehingga kondisi yang berpotensi merusak kehidupan aman dan damai dapat diminimalisir.

Dalam rangka mewujudkan kondisi yang demokratis di Kabupaten Banjarnegara yang pluralis, dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik atau lembaga politik lainnya, sehingga demokrasi yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa terjadi konflik baik konflik horizontal maupun vertikal dan meminimalisir terjadinya disintegrasi dalam masyarakat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa yang akan mengganggu kondisi stabilitas nasional.

Untuk meningkatkan kehidupan Banjarnegara yang religius antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya



tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

4) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk 5 tahun ke depan 2011-2016 akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

5) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan layanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan kualitas ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan, tenaga kependidikan yang berkualitas serta ketersediaan perpustakaan yang memadai.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh



dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan sosial ditempuh melalui penanganan terhadap penyandang masalah sosial yaitu dengan santunan dan pembinaan terhadap penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan penyandang masalah sosial lainnya.

Upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak ditempuh melalui peningkatan pemberdayaan perempuan serta usaha dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak.

Di bidang keluarga berencana, upaya yang dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta dengan pelatihan ekonomi produktif bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu.

Bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan lapangan kerja.

Bidang penegakan hukum ditempuh dalam rangka peningkatan kesadaran dan tertib hukum.

Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan layanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan kualitas ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran dan tertib hukum diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6) Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi.

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini merupakan suatu



ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah	1 Meningkatkan ketahanan pangan	1 Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan	1 Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan
	2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian
			2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal
			3 Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam
	4 Peningkatan sarana prasarana pertanian		
3 Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Peningkatan Nilai Tukar Petani	1 Pengembangan agribisnis pertanian	
4 Meningkatkan produksi peternakan	1 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak	1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan	
5 Meningkatkan produksi perikanan	1 Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	6 Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan	1 Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal
	7 Meningkatkan kunjungan wisatawan	1 Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata	1 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 2 Pengelolaan even pariwisata
Meningkatkan peran sektor perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah	1 Meningkatnya kinerja perdagangan	1 Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif	1 Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan
Meningkatkan peranan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah	1 Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan	1 Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif	1 Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan investasi dan industri untuk perluasan lapangan kerja	1 Meningkatkan jumlah investasi	1 Penciptaan iklim investasi yang kondusif	1 Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
	2 Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja	1 Penyediaan informasi tenaga kerja
			2 Pelatihan SDM tenaga kerja
	3 Meningkatkan kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	1 Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM	1 Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM
4 Meningkatkan produksi pertambangan dan energy	1 Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan	1 Pembinaan usaha pertambangan dan energy	
Meningkatkan peran sektor kehutanan dalam perekonomian daerah	1 Meningkatkan produksi hasil kehutanan	1 Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan	1 Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan

MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur	1 Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan diklat
Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	1 Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif	1 Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down dan bottom up
	2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian	1 Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Peningkatan pelayanan prima	1 Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
		2 Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat	2 Pengembangan SOP, SPP, OSS 1 Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Keuangan dan Aset Daerah	1 Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
			2 Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah
			3 Revitalisasi BUMD
Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah	1 Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	1 Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
Meningkatkan Pelayanan komunikasi, informasi, dan penataan administrasi kependudukan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	1 Penataan, Pemutakhiran dan Pemasarakatan Informasi	1 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

**MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	1 Menurunnya jumlah korban bencana	1 Peningkatan mitigasi manajemen bencana	1 Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu	1 Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
		2 Meningkatkan peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu	
Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan toleransi beragama	1 Meningkatkan pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat	1 Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat	1 Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan

**MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penunjang perekonomian	1 Meningkatkan sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi	1 Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi	1 Peningkatan dan pengembangan jalan
			2 Peningkatan dan pengembangan jembatan
			3 Pembangunan jalan lingkar utara
			4 Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota
	2 Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan yang layak huni	1 Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan	1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan
			2 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
			3 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
			4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penunjang perekonomian	3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1 Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan	1 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif
			2 Pengendalian kelayakan angkutan
			3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung
			4 Pengembangan dan optimalisasi terminal
	4 Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi	1 Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi	1 Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT
	5 Meningkatkan daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan	1 Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan	1 Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan
			2 Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan
6 Meningkatkan penanganan daerah rawan bencana	1 Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir	1 Normalisasi sistem drainase	
		2 Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu	
Mewujudkan penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah	1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah	1 Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang	1 Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah
			2 Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	1 Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup	1 Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup	1 Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan
			2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
			3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
			4 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
	2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi	1 Optimalisasi potensi sumber energi	1 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
			2 Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)



MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau	1 Meningkatkan perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat	1 Perbaiki sistem dan akses pendidikan	1 Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan
	2 Tersedianya akses infrastruktur pendidikan		2 Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan
	3 Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan		3 Perbaiki sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan
	4 Meningkatkan mutu pendidikan		4 Peningkatan mutu pendidikan
	5 Meningkatkan minat baca masyarakat		5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
Menjamin dan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	1 Perbaiki sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	1 Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin
			2 Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap
			3 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan social	1 Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	1 Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			2 Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS
			3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
			4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan
	2 Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian	1 Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi	
2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	1 Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat	1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak	1 Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	1 Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak
			2 Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
			3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
			5 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Meningkatkan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana	1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi
			2 Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	1 Meningkatkan profesionalisme angkatan kerja	1 Perbaiki sistem ketenagakerjaan	1 Perbaiki kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum	1 Meningkatkan tertib hukum	1 Peningkatan Penegakan Hukum	1 Penegakan PERDA
			2 Pembinaan Kesadaran Hukum

**MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga baik nasional maupun internasional	1 Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan	1 Pengembangan potensi kepemudaan	1 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan
	2 Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga	1 Peningkatan Prestasi Olah Raga	1 Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat
			2 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)
			3 Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga
		4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan bersejarah dan cagar budaya sebagai identitas bangsa	1 Meningkatkan pelestarian seni budaya	1 Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	1 Pengembangan identitas daerah
	2 Meningkatkan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya		2 Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya
			3 Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
			4 Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal
			5 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan benda/bangunan cagar budaya



4. KEBIJAKAN

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus.
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah Tahun 2011-2016, diperlukan Kebijakan Umum untuk memayungi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk prioritas-prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Banjarnegara merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan diatas, maka arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait dengan pencapaian visi misi Bupati adalah sebagai berikut :



a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2012)

Pada tahun pertama pembangunan lebih diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk serta masalah penanganan kesejahteraan sosial.

Selain fokus diatas, pembangunan tahap pertama juga fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata serta peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dan perhubungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama wilayah pedesaan.

Selengkapnya fokus arah kebijakan tahun pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan
- 2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal
- 4) Pengembangan agribisnis pertanian
- 5) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan
- 6) Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
- 8) Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan
- 9) Pembinaan usaha pertambangan dan energi
- 10) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan diklat
- 11) Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down dan bottom up
- 12) Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
- 13) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
- 14) Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
- 15) Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- 16) Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- 17) Peningkatan dan pengembangan jalan
- 18) Peningkatan dan pengembangan jembatan
- 19) Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan



- 20) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif
- 21) Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan
- 22) Rehabilitasi jaringan irigasi
- 23) Normalisasi sistem drainase
- 24) Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah
- 25) Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan
- 26) Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
- 27) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan
- 28) Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan
- 29) Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin
- 30) Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap
- 31) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 32) Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak
- 33) Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi
- 34) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan
- 35) Pengembangan identitas daerah

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2013)

Pada tahun kedua disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana pertanian
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
3. Pelatihan SDM tenaga kerja
4. Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan
5. Pengembangan SOP, SPP, OSS
6. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)



7. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah
8. Revitalisasi BUMD
9. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
10. Pembangunan jalan lingkar utara
11. Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota
12. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
13. Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial
14. Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan
16. Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
17. Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan
18. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
19. Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS
20. Penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
21. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
22. Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
23. Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
24. Penegakan PERDA
25. Pembinaan Kesadaran Hukum
26. Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat
27. Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2014)

Pada tahun ketiga disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam
- 2) Pengelolaan even pariwisata
- 3) Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
- 4) Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM
- 5) Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan



- 6) Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
- 7) Pengendalian kelayakan angkutan
- 8) Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu
- 9) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 10) Peningkatan mutu pendidikan
- 11) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
- 12) Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan
- 13) Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
- 14) Perbaiki kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
- 15) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (*sport centre*).
- 16) Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2015)

Pada tahun keempat disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal
- 2) Peningkatan sistem pengarsipan, SDM aparatur dan sarana kearsipan daerah
- 3) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung
- 4) Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT
- 5) Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 6) Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi
- 7) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 8) Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga.
- 9) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan local



e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2016)

Pada tahun kelima disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi tenaga kerja
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan kerjasama pelayanan informasi dengan media massa
- 3) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan
- 4) Pengembangan dan optimalisasi terminal
- 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi sda lh dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
- 6) Peningkatan kualitas hidup perempuan
- 7) Pembinaan atlit dan pelaku olahraga
- 8) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

Arah kebijakan ini disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, artinya arah kebijakan ini merupakan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Secara ringkas keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

5. PROGRAM

Program pembangunan daerah merupakan merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Agenda dan program pembangunan daerah berdasar kebijakan umum adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menuju agroindustri terpadu, dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :



- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
 - b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - f. Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - g. Peningkatan Agribisnis Pertanian
 - h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - k. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - l. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - m. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar
 - n. Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2. Pengembangan Pariwisata Terpadu
 - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perluasan Lapangan Kerja di Semua Sektor
 - a. Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Implementasi Ekonomi Kerakyatan
 - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



5. Percepatan Pembangunan Pedesaan
 - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat
 - e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
6. Penataan Birokrasi Menuju Profesionalisme Aparat Pemerintah
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Pengembangan Data/Informasi
 - e. Program Perencanaan Sosial Budaya
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - i. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - k. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - l. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - m. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - n. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
 - o. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - p. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - q. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Meningkatkan Kehidupan Beragama Dengan Memperbanyak dan Memanfaatkan Sarana Ibadah Secara Optimal
 - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



8. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur di Wilayah Pedesaan
 - a. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
9. Penataan Wilayah Perkotaan dengan Arah Kebijakan dari “Sungai Serayu Sebagai Batas Kota Menjadi Sungai Serayu Berada di tengah Kota”
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang
 - b. Program Pemanfaatan Ruang
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10. Perbaikan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - n. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
11. Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - b. Program Pendidikan Menengah
 - c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - e. Program Pendidikan Non Formal
 - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



12. Peningkatan Pemberdayaan Kaum Perempuan, Generasi Muda, dan Perlindungan Anak
 - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
 - d. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - e. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
13. Pengembangan Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Olahraga, dan Industri Kreatif
 - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah
 - c. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - f. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
 - g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
14. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 - e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2011-2016, pada tahun kedua disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, maka prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan sarana prasarana pertanian
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
3. Pelatihan SDM tenaga kerja
4. Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan
5. Pengembangan SOP, SPP, OSS
6. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)
7. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah
8. Revitalisasi BUMD
9. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
10. Pembangunan jalan lingkar utara
11. Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota
12. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
13. Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial
14. Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan
16. Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
17. Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan
18. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
19. Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS
20. Penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
21. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
22. Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
23. Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
24. Penegakan PERDA
25. Pembinaan Kesadaran Hukum
26. Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat
27. Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 dioperasionalkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013. Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun 2013.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara ditetapkan 6 (enam) misi, 51 (lima puluh satu) sasaran, 345 (tiga ratus empat puluh lima) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara dan telah disepakati Penetapan Kinerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lampiran I Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013.